

## **Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementerian Perhubungan Tahun 2021**

**Amalia Aldira Arifin<sup>1</sup>, Desmon Baginda Silaen<sup>2</sup>, Devi Damayanti<sup>3</sup>, Dodi Ikin Saputra<sup>4</sup>**

Universitas Bina Sarana Informatika<sup>1,2,3</sup>

64211740@bsi.ac.id , 64212278@bsi.ac.id , 64212522@bsi.ac.id , 64212298@bsi.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 7 Juli 2024 Halaman : 67-72	<i>An analysis of the budgeting and budget realization in the 2021 Financial Statements of the Ministry of Transportation reveals several important aspects of the management of public funds in the transportation sector. The significant difference between the estimated and realized non-tax revenue budget indicates the need to review the revenue planning process for accuracy of estimation and effectiveness of management. The mismatch between expenditure budget and realization emphasizes the importance of efficient use of public funds. Unrealized allocations of social assistance funds indicate the need to review policies to support vulnerable communities. This analysis highlights the importance of transparency, accountability and responsive policies in the management of the transport sector budget to ensure effective and efficient use of public funds.</i>
<b>Keywords:</b> Performance Analysis Financial Expenditure Reports Expenditure Budget	

### **Abstrak**

Analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana publik sektor transportasi. Perbedaan signifikan antara estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proses perencanaan pendapatan untuk akurasi estimasi dan efektivitas pengelolaan. Ketidaksesuaian anggaran belanja dan realisasinya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Pengalokasian dana bantuan sosial yang tidak terealisasi menunjukkan kebutuhan peninjauan kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan. Analisis ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan responsif dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

**Kata Kunci :** Analisis Kinerja, Laporan Keuangan Belanja, Anggaran Belanja

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan anggaran belanja negara memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin tercapainya target-target pembangunan nasional. Pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan menjadi salah satu instansi vital yang bertanggung jawab atas alokasi dan realisasi anggaran yang signifikan untuk mendukung berbagai program dan proyek transportasi termasuk di ibu kota. Mengingat peran strategisnya, analisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Kementerian Perhubungan menjadi penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi belanja yang terjadi. Fenomena ini mencerminkan adanya potensi inefisiensi dalam manajemen anggaran yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan sektor transportasi. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang kurang matang, kendala administrasi, hingga masalah teknis dalam pelaksanaan proyek.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji aspek-aspek pengelolaan anggaran publik, termasuk teori-teori anggaran, manajemen keuangan publik, dan analisis kinerja anggaran. Menurut Mikesell (2018), pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang komprehensif. Sementara itu, Wildavsky (1986) menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas dalam pengelolaan anggaran publik untuk menghadapi dinamika dan tantangan yang ada. Studi-studi ini menjadi landasan penting dalam mengkaji bagaimana Kementerian Perhubungan mengelola dan merealisasikan anggarannya di tahun 2021.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan pemetaan rinci mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran belanja pada sektor transportasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan manajemen anggaran di masa depan. Inovasi dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode analisis yang terintegrasi dengan pendekatan praktis dalam manajemen keuangan publik, yang dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya. Penelitian ini juga membuka wacana baru mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kinerja realisasi anggaran belanja. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Analisis ini akan mencakup perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi belanja, identifikasi penyebab ketidaksesuaian, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, pendekatan ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja anggaran. Unit analisisnya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan unit observasinya adalah Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Kementerian Perhubungan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis kinerja (Mahmudi, 2016: 155), antara lain: 1) analisis varians belanja; 2) analisis pertumbuhan belanja; 3) analisis konsistensi belanja; dan 4) analisis rasio efisiensi belanja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2021 Kementerian Perhubungan

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.341.922.174	0,00	1.729.738.044
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>1.341.922.174</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.738.044</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	32.063.269.000	31.226.146.586	97,39	26.931.951.693
Belanja Barang	B.4	102.254.138.000	101.673.266.161	99,43	110.330.817.072
Belanja Modal	B.5	6.681.444.000	6.678.726.191	99,96	18.182.206.301
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>140.998.851.000</b>	<b>139.578.138.938</b>	<b>98,99</b>	<b>155.444.975.066</b>

(sumber: [https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20221111104346.LAPORAN KEUANGAN TA 2021 AUDITED.pdf](https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20221111104346.LAPORAN%20KEUANGAN%20TA%20201%20AUDITED.pdf))

Dalam konteks akuntansi, terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran penerimaan negara bukan pajak yang diestimasi menjadi nol dan realisasinya yang mencapai Rp 1.341.922.174. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup kecil antara anggaran belanja sebesar Rp 140.998.851.000 dan realisasi belanja sebesar Rp 139.578.138.938. Belanja tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni belanja operasional yang meliputi belanja pegawai (dianggarkan Rp 32.063.269.000 dengan realisasi Rp 31.226.146.586), belanja barang (dianggarkan Rp 102.254.138.000 dengan realisasi Rp 101.673.266.161), belanja modal (dianggarkan Rp 6.681.444.000 dengan realisasi Rp 6.678.726.191), dan belanja bantuan sosial yang dianggarkan nol dengan realisasi nol. Analisis ini menunjukkan tingkat ketepatan estimasi anggaran dan keakuratan realisasi belanja, serta memberikan gambaran mengenai penggunaan dana publik dalam aspek-operasional dan investasi di luar pajak pada tingkat pemerintah.

## **Penganggaran Kementerian Perhubungan**

Sistem penganggaran Kementerian di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan terkadang melibatkan sejumlah tantangan. Kementerian Keuangan memiliki peran kunci dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga. Proses ini melibatkan estimasi pendapatan dan pengeluaran, serta alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing kementerian. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses penganggaran, termasuk dinamika politik, prioritas pembangunan nasional, serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik dalam setiap tahapan penganggaran, untuk memastikan bahwa anggaran yang disetujui dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam mengelola anggaran belanja. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, proyek infrastruktur besar, dan dinamika ekonomi global mempengaruhi alokasi dan realisasi anggaran pada kementerian ini. Pembahasan awal akan fokus pada pengaruh konteks eksternal terhadap perencanaan dan eksekusi anggaran Kementerian Perhubungan.

## **Analisa Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran**

Penerimaan Anggaran dan Realisasinya: Data mengungkapkan perbedaan yang cukup signifikan antara estimasi penerimaan negara bukan pajak yang dianggarkan nol dengan realisasi yang sebesar Rp 1.341.922.174. Pengeluaran Anggaran dan Realisasinya: Terdapat perbedaan yang lebih kecil antara anggaran belanja sebesar Rp 140.998.851.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp 139.578.138.938. Dalam konteks teori akademis tentang penganggaran publik, perbedaan antara estimasi dan realisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran menjadi fokus penting dalam analisis keuangan pemerintah. Teori-teori tersebut membahas konsep-konsep seperti teori agensi, kebijakan fiskal, dan teori perubahan perilaku.

Dalam konteks penganggaran publik. Teori agensi, misalnya, menyoroti hubungan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat atau pemegang kepentingan) dalam proses penganggaran dan penggunaan dana publik, dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran. Sementara itu, teori kebijakan fiskal memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan pendapatan dan pengeluaran mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Dalam hal ini, ketidaksesuaian antara estimasi dan realisasi penerimaan negara bukan pajak serta anggaran belanja pada Kementerian Perhubungan menjadi titik fokus, dengan analisis yang melibatkan faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, ketidakpastian ekonomi, dan implementasi program-program pemerintah. Dengan memanfaatkan kerangka teoritis ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penganggaran publik dan efisiensi penggunaan dana publik di tingkat kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

## **Analisa Anggaran Belanja Pegawai**

Meskipun anggaran belanja pegawai telah diestimasi dengan cermat sebesar Rp 32.063.269.000, realisasi belanja pegawai hanya mencapai Rp 31.226.146.586. Dalam analisis ini, perbedaan antara estimasi dan realisasi belanja pegawai di Kementerian Perhubungan mengundang refleksi mendalam terhadap efektivitas perencanaan sumber daya manusia dan manajemen anggaran di dalam organisasi pemerintah.

Teori manajemen sumber daya manusia menyoroti pentingnya pengelolaan dan alokasi sumber daya manusia yang efisien, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti rekrutmen, pengembangan, dan retensi pegawai.

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan antara estimasi dan realisasi belanja pegawai, seperti fluktuasi biaya pegawai, peningkatan gaji, atau kebutuhan tambahan dalam program pengembangan sumber daya manusia, perlu dianalisis dengan cermat. Implikasinya terhadap kinerja organisasi dan kebijakan sumber daya manusia Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika internal dan eksternal organisasi, serta strategi yang efektif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kebijakan pemerintah di sektor transportasi.

### **Analisa Belanja Barang**

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 102.254.138.000, realisasi belanja barang mencapai Rp 101.673.266.161. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja barang di Kementerian Perhubungan, teori manajemen keuangan publik memberikan pandangan yang penting. Konsep alokasi anggaran, pengawasan, dan evaluasi pengeluaran publik menjadi relevan dalam menganalisis perbedaan antara estimasi dan realisasi belanja barang. Selain itu, teori efisiensi penggunaan dana publik menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien untuk mendukung operasional dan layanan yang disediakan oleh suatu lembaga pemerintah.

Faktor-faktor seperti fluktuasi harga barang, perubahan kebijakan pengadaan, atau keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dapat memengaruhi realisasi belanja barang. Evaluasi dampak dari perbedaan ini terhadap operasional dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan memerlukan penekanan pada efisiensi penggunaan dana publik dalam mendukung infrastruktur transportasi dan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan kerangka teoritis ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika pengeluaran belanja barang dalam konteks manajemen keuangan publik dan operasional Kementerian Perhubungan.

### **Analisa Belanja Modal**

Penelitian ini menemukan bahwa estimasi anggaran belanja modal sebesar Rp 6.681.444.000 hampir mencapai realisasi yang sebesar Rp 6.678.726.191. Dalam menganalisis efektivitas penggunaan dana belanja modal pada Kementerian Perhubungan, teori ekonomi pembangunan dan manajemen proyek menjadi relevan. Konsep alokasi dana untuk investasi dalam infrastruktur transportasi sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Teori tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana belanja modal secara efisien dan efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur transportasi yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap perbedaan yang kecil antara estimasi dan realisasi belanja modal dapat memberikan indikasi positif tentang manajemen proyek dan penggunaan dana yang tepat. Namun, untuk mengevaluasi efektivitas sebenarnya dari penggunaan dana belanja modal, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap hasil proyek-proyek yang didanai dan dampaknya terhadap pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana pengelolaan dana belanja modal dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam konteks Kementerian Perhubungan.

### **Analisa Belanja Bantuan Sosial**

Meskipun dianggarkan nol, realisasi belanja bantuan sosial juga nol. Pembahasan ini akan menyoroti kebijakan Kementerian Perhubungan terkait bantuan sosial dan implikasinya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam sektor transportasi. Analisis terhadap penganggaran nol dan realisasi nol belanja bantuan sosial di Kementerian Perhubungan menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan dan prioritas penggunaan dana dalam sektor transportasi.

Teori kebijakan publik dan keadilan sosial memberikan wawasan tentang pentingnya alokasi sumber daya yang adil dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan terkait bantuan sosial menjadi

penting untuk memahami mengapa alokasi dana tersebut tidak direalisasikan. Implikasinya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam sektor transportasi dapat mencakup dampak negatif terhadap aksesibilitas, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam akses transportasi. Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran dan dampak kebijakan bantuan sosial dalam mendukung kebutuhan masyarakat dalam sektor transportasi, serta menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan adalah bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan dana publik dalam sektor transportasi, yaitu:

Perbedaan yang signifikan antara estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap proses perencanaan pendapatan negara untuk memastikan keakuratan estimasi dan pengelolaan yang lebih efektif. Teori agensi dan teori kebijakan fiskal memberikan pandangan yang penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Perbedaan antara anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan perlunya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik untuk mendukung operasional dan investasi di sektor transportasi. Teori manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan publik memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan yang akurat dan efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia dan alokasi anggaran.

Pengalokasian dana belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan menyoroti perlunya peninjauan kembali kebijakan dan prioritas penggunaan dana untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang rentan dalam sektor transportasi, sejalan dengan teori kebijakan publik dan keadilan sosial.

Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penganggaran dan pengelolaan dana publik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan di sektor transportasi, serta menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik dalam sektor transportasi, langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian terhadap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran perlu terus dilakukan.

## REFERENCES

Andriani, Y. (2019). *Akutansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Baswir, R. (2019). *Anggaran Publik*. Yogyakarta: BPF.

(2021, November 11). Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021: [https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/2022111104346.LAPORAN\\_KEUANGAN\\_TA\\_2021\\_AUDITED.pdf](https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/2022111104346.LAPORAN_KEUANGAN_TA_2021_AUDITED.pdf)

Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Paulus Journal of Accounting, (PJA). (2020). *ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN*

PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA, 2.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/393>

Marchelino, D. (2018). *ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1942>

Haryadi, Erisandi S. I. N. L. R. M.; (2020). *Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur*, 9.  
<https://media.neliti.com/media/publications/393202-none-9f0f5baf.pdf>

Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). *Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA)*, 17(1), 93-100.  
<https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/97/69>

Priyantini, N., Santoso, R. A., Wulandari, E., & Octaviani, J. (2023). *Analisa Anggaran Dan Realisasi Penjualan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Tahun 2022*, 1(1), 37-44.  
<http://45.118.112.109/ojspasim/index.php/jurnalilmiahmahasiswa/article/view/433>

Ramadani, R. F. (2017). *Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda*, 5(3).  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=614109&val=6384&title=ANALISIS%20KINERJA%20ANGGARAN%20DAN%20REALISASI%20PENDAPATAN%20DAN%20BELANJA%20DAERAH%20PERMERINTAH%20KOTA%20SAMARINDA>.

Mentang, F., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2020). *Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado*, 15(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28006>.

Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). *Analisis kinerja realisasi anggaran dalam belanja daerah Pemerintah Probolinggo*, 6(2).  
<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/338>